

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Agus Dwiyanto, 2021, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2020, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Charles Simabura, 2022, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eko Prasoj, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eny Kusdarini, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Fausiah Nurlan, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Jawa Tengah.
- Jimly Asshiddiqie, 2022, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaelan, 2020, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lalu Husni, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2021, *Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- M. Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- Marbun, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syarif, Rizki Ramadhani, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang.

Ni'matul Huda, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, ed. khusus, Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 2022, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Abdul Latif, 2022, "Akuntabilitas Penggunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2.

Ahdi Rajab Maliq, Selamat Lumban Gaol, 2024, "Ratio Legis Pengaturan PPPK Menggantikan Keberadaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Hukum Kepegawaian Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2.

Alih Aji Nugroho, Rindri Andewi Gati, 2023, "Menata Pegawai Non-Asn Pasca Kebijakan UU ASN 2023", *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2.

Asma Latifa, Aldri Frinaldi, 2024, "Transformasi Digital dalam Manajemen Kepegawaian," *Future Academia Journal*, Vol. 3, No. 4.

Aulia Zahra, Meyzia Akilah A., Raisya F. Humaira, 2024, "Analisis Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, Vol. 7, No. 5.

- Candra Husein Puji Putra, Ivan Widjaja, 2025, "Harmonization Of PPPK Principal Appointment Regulations: Normative Legal Perspective", *International Journal Of Law, Crime And Justice*, Vol. 2, No. 1.
- Chindy Arum Septiani, Eka Deviani, 2026, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Bagi PPPK Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung", *Journal Of Law And Social Change Review*, Vol. 1, No. 1.
- D.T. Lastiwi, F. Suryono, 2022, "Strategi Pengembangan Kompetensi ASN dan Arah Kebijakannya," *Nusantara Innovation Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Eko Prasajo, 2021, "Reformasi Birokrasi dan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*.
- Emirza Nur Wicaksono, 2025, "Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia", *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 3, No. 1.
- A. Rozie, S. Halimah, G. Y. Saputra, 2025, "Dosen PPPK antara Profesionalisme dan Kepastian Karier," *Education and Research Journal*, Vol. 6, No. 2.
- Fadhil Wirdiyan Ihsan, Riszka Maurilla Damayanti, 2026, "Analisis Kritis Implikasi Hukum Keputusan Menteri PANRB No 16 Tahun 2026 Tentang PPPK Paruh Waktu Terhadap Hak Dan Kewajiban Pegawai Non-ASN", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Githa Asmadeningrum Rosady, Jovita Lituhayu Maheswari, Romadona Putri Pertiwi, "Analisis Sistem Pemerintahan Daerah dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT," *JRP: Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 2.
- I. Syahputra, 2024, "Implementasi Kebijakan Permen PANRB No 20 Tahun 2022 Dalam Penataan PPPK," Tesis, Universitas Medan Area.
- Intan Nur'Aini, "Lembaga Independen Pengawas ASN: Langkah Maju Reformasi Atau Beban Baru Kelembagaan Negara," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4.
- Kornelius Benuf, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Lynda Ce, 2025, "Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6, No. 2.

- M. Chikal Chakti, Baso Madiung, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS", *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 6, No. 2.
- M. H. Adzhar, D. W. Nirmala, U. Khoiruddin, 2025, "Analisis Kritis Perkembangan Kebijakan PPPK di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 1.
- Moh. Gandara, 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Ni Made Cindy Nadila Putri, 2026, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer Instansi Pemerintahan Yang Tidak Lolos Dalam Seleksi PPPK", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 14, No. 4.
- Nourismi Hamada, Erlina, 2025, "Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 5.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2023, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2.
- R. Hidayat, 2022, "Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Perspektif Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rina Herlina, 2023, "Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 2.
- Rofik Fauzan, 2024, "Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Indonesia," *Public Service and Governance Journal*, Vol. 5, No. 1.
- S. Nugroho, 2022, "Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik", *Jurnal Administrasi Publik*.
- S.F Marbun, 2018, "Kewenangan Pemerintah dan Prinsip Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara," *Justiciabalen*, Vol. 1, No. 2.
- Tanti Kirana Utami, 2022, "Perlindungan Jaminan Hari Tua Bagi PPPK Ditinjau Sesuai Dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Uly Sigar Desiana, Jacobus Ronald Mawuntu, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 1.
- Yik Soleh Assegaf, Widhi Chayo Nugroho, 2025, "Perlindungan Hukum bagi PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024.

SUMBER INTERNET/SKRIPSI/TESIS

Dede Leni Mardianti, 2026, "Menpan-RB Terbitkan Peraturan Menteri soal PPPK Paruh Waktu," *Tempo.co*, 5 Juli 2026, diakses pada 15 Juli 2026

Dede Leni Mardianti, 2026, "Kemenpan: PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang," *Tempo.co*, 6 Juli 2026, diakses pada 15 Juli 2026.

Hermanto Ansam, 2026, "Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2026 Terbit, Status PPPK Paruh Waktu Kini Jelas," *Goriatu.com*, diakses pada 15 Juli 2026.

Jevany Pradini, Tri Sulistyono, 2025, "Analisis Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara", *Book Chapter Hukum Dan Lingkungan Jilid 1*, Semarang.

Jumali, 2025, "Gaji PPPK Paruh Waktu 2025, Jakarta Tertinggi Dan Jateng Terendah," *Harian Jogja*, 12 September 2025.

Kurikulum Merdeka.id, 2026, "PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Tentang PPPK

PW (Paruh Waktu)," diakses 16 Juli 2026.

KRUI, 2026, "PPPK Paruh Waktu Pesibar Pertanyakan Kejelasan Gaji," *Lampung TV News*, 11 Februari 2026.

Nurul Hurriyyah, 2025, "Pemenuhan Hak Guru Honorer Dalam Proses Pengangkatan Menjadi Guru PPPK," Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Silmi Nurul Utami, 2025, "Apa Itu PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Lengkap Dan Gaji Terbaru!," *Kompas.com*, 11 September 2025.

Siaran Pers, 2025, "Kepala BKN: PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Non-ASN Database BKN Mendapatkan Kepastian Hukum," BKN Publikasi, Jakarta.

Soetomo Samsu, 2025, "Gaji PPPK Paruh Waktu Maksimal Rp 350 Ribu Per Bulan," *Jpnn.com*, 17 Januari 2025.

Sri Pujianti, 2024, "Hak Pegawai Honorer Tetap Terakomodir Dalam UU ASN," Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 15 Juli 2026,

Rafli Ilham Bimantoro, 2025, "Polemik Penataan Tenaga Honorer Di Indonesia Pasca UU Nomor 29 Tahun 2023", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

